JURNAL ILMIAH MIMBAR DEMOKRASI
e-ISSN: 2597-4513
p-ISSN: 1412-1875

Sikap politik mahasiswa Papua UNJ terhadap pemekaran wilayah Papua tahun 2022

Iqbal Syafrudin*, Mohammad Maiwan, Asep Rudi Casmana, M. Fajar Sae Firdaus Gusti Firmansah

Universitas Negeri Jakarta, Jl. Rawamangun Muka, East Jakarta 13220, Indonesia

*korespondensi penulis: syafrudin@unj.ac.id

Informasi Artikel
Received:
15/09/2023
Accepted:
05/10/2023

ABSTRAK

Penelitian ini memiliki tujuan untuk memperoleh data dan menganalisis tentang sikap politik mahasiswa Papua UNJ terhadap pemekaran wilayah Papua. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan metode campuran (mixed). Pada penelitian ini dilakukan pengumpulan data melalui angket serta wawancara dalam kurun waktu yang bersamaan kepada informan yaitu mahasiswa Papua yang terdapat di UNJ, angket dibagikan secara Online dan wawancara dilakukan dengan masing-masing informan. Pada penelitian ini didapatkan hasil yakni 87,5% atau sejumlah 7 dari 8 orang mahasiswa Papua yang ada di Universitas Negeri Jakarta tidak setuju dengan kebijakan pemekaran wilayah Papua yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan kepada para mahasiswa Papua. Dalam penelitian ini dihasilkan dua pendapat terhadap pemekaran Papua, yakni menolak atau mendukung Penolakan yang dilakukan oleh mahasiswa Papua berlandasakan masih banyaknya kasus pelanggaran HAM dan berpotensi menyingkirkan orang asli Papua karena akkan adanya Transmigrasi, sedangkan dukungan beralasan adanya pemekaran lapangan pekerjaan akan mudah didapatkan bagi para mahasiswa Papua yang telah lulus dan kembali ke Papua. Berdasarkan hasil penelitian dapat dikatakan sebagian besar dari mahasiswa Papua UNJ menolak akan kebijakan pemekaran wilayah Papua.

Kata kunci: papua, pemekaran wilayah, sikap politik mahasiswa

ABSTRACT

This research aims to obtain data and analyze the political attitudes of Papuan UNJ students towards the expansion of the Papua region. The approach used in this research is a mixed methods approach. In this research, data was collected through questionnaires and interviews at the same time with informants, namely Papuan students at UNJ, questionnaires were distributed online and interviews were conducted with each informant. In this research, the results obtained were that 87.5% or 7 out of 8 Papuan students at Jakarta State University did not agree with the policy of expanding the Papua region that had been carried out by the Indonesian government. Based on interviews conducted with Papuan students. In this research, two opinions were produced regarding the expansion of Papua, namely rejecting or supporting the rejection made by Papuan students based on the fact that there are still many cases of human rights violations and the potential to get rid of indigenous Papuans because of transmigration, while support is based on the reason that the expansion of job opportunities will be easy for students to get. Papua who have graduated and returned to Papua. Based on the research results, it can be said that the majority of UNJ Papuan students reject the policy of expanding the Papua region.

Keywords: *espansions region, papua, student political attitudes*

Copyright © 2023 (Iqbal Syafrudin, Mohammad Maiwan, Asep Rudi Casmana, M. Fajar Sae Firdaus Gusti Firmansah). All Right Reserved

JURNAL ILMIAH MIMBAR DEMOKRASI
e-ISSN: 2597-4513
p-ISSN: 1412-1875

How to Cite: Syafrudin, I., Maiwan, M., Casmana, A.R., Firdaus, M.F.S., & Firmasyah, G. (2023). Sikap politik mahasiswa Papua UNJ terhadap pemekaran wilayah Papua tahun 2022. *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*, 23(1), 217-220. DOI: 10.21009/jimd.v23i1.38879

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

Pendahuluan

Pemekaran wilayah menjadi pembicaraan yang sangat menggairahkan di berbagai wilayah yang akan, sedang dan telah mengalami proses pemekaran. Papua Barat, yang dikenal sebagai wilayah kepala burung merupakan wilayah yang diprogramkan untuk pemekaran (Yapsenang et al., 2022). Pemekaran wilayah Papua kemudian berkembang dan menjadi fokus pembicaraan di berbagai kalangan (Wangge & Lawson, 2021). Pada tanggal 25 Juli 2022 telah disahkan tiga Undang-Undang (UU) terkait pembentukan provinsi baru di Papua, yaitu UU Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan, UU Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah, dan UU Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan (Yamin et al., 2023) .

Kebijakan ini mendapat reaksi keras dari berbagai komponen di Papua (Kambu et al., 2022), terutama dari kalangan mahasiswa. Pro dan kontra terhadap pemekaran wilayah papua tak terbendung. Dengan pemekaran ini orang Papua menuntut hak-haknya yang selama ini terabaikan (Indrawan et al., 2017). Untuk meminimalisasi keadaan terutama tuntutan untuk menentukan nasib sendiri/ merdeka maka langkah strategis yang ditempuh adalah pemekaran Provinsi untuk mempercepat pembangunan, rentang kendali serta mempercepat peningkatan kesejahteraan orang Papua(Kusumaryati, 2019). Dengan menggunakan kritik sejarah, muncul pertanyaan apakah dengan pemekaran Provinsi, orang Papua akan sejahtera serta pembangunan di Papua akan berkembang dengan cepat dan pesat (Putra et al., 2024).

Penelitian relevan yang dilakukan yang bertemakan sama dengan penelitian ini salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh Pugu (2022) yang memiliki judul penelitian Pro dan Kontra Isu Pemekaran Papua Suatu Kajian Hubungan Internasional. Dalam penelitian tersebut terdapat dua kelompok yaitu pro dan kontra, akan tetapi pada penelitian ini hanya dijelaskan sistematika pemekaran wilayah Papua dan opini kontra tanpa memunculkan secara seimbang opini pro dan kontra. Penelitian yang dilakukan oleh Pugu (2022) masih mengambil data dari berbagai macam pihak tanpa spesifik dari satu pihak mana pun.

Jika dilihat dari teorinya, bahwa dalam UU No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah pasal 2 ayat 3 menyebutkan tujuan Otonomi Daerah adalah untuk menjalankan otonomi yang seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintah dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah (Niessen, 2022). Pada dasarnya pemerintah pusat memberikan adanya pemekaran terhadap Provinsi Papua ini ditujukan untuk pembangunan, ekonomi, mensejahterakan masyarakat, dan tak luput juga untuk meredam keinginan masyarakat Papua yang ingin memisahkan diri secara politik dari Indonesia (Sopaheluwakan et al., 2023; Sloan et al., 2019).

Berdasarkan penelitian relevan di atas, jika dibandingkan dengan penelitian yang akan dilakukan maka terdapat beberapa unsur kebaharuan dari penelitian yang akan dilakukan yaitu penelitian ini akan membahas secara spesifik sikap politik mahasiswa terhadap pemekaran wilayah Papua, yang mana pada penelitian yang mengangkat topik penelitian sebelumnya masih tidak secara spesifik mendapatkan data dari pihak mana.

Metode

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan metode campuran (mixed method). Dalam penelitian ini dilakukan studi litelatur sebagai dasar penelitian yang dilanjutkan dengan observasi. Pada penelitian ini pengisian angket dan wawancara dilakukan secara bersamaan yang selanjutnya diakhiri dengan teknik dokumentasi. Responden atau informan pada penelitian ini sejumlah 8 informan dari total 40 mahasiswa yang terdata menjadi mahasiswa UNJ.

JURNAL ILMIAH MIMBAR DEMOKRASI
e-ISSN: 2597-4513
p-ISSN: 1412-1875

Hasil dan Pembahasan

Pada penelitian kali ini peneliti memilih objek penelitian untuk menyikapi kebijakan pemekaran wilayah Papua dari mahasiswa Papua yang berkuliah di Universitas Negeri Jakarta. Mereka dipilih karena sebagai masyarakat lokal yang berasal dari Papua, sehingga pastinya lebih tahu dan terdampak langsung dengan adanya pemekaran wilayah Papua. Kebijakan tersebut dilakukan awalnya atas dasar kepentingan masyarakat demi kesejahteraan yang kini sudah berlangsung selama hampir setahun setelah disahkan melalui UU. Selama kurun waktu tersebut tentunya dapat dirasakan dampak baik positif maupun negatif yang timbul akibat dilakukannya pemekaran Papua.

Pada penelitian ini, para mahasiswa Papua UNJ diminta untuk memberikan sikap terkait pemekaran wilayah Papua yang telah dilaksanakan oleh pemerintah. Menyikapi kebijakan pemekaran wilayah Papua para mahasiswa Papua UNJ di Universitas Negeri Jakarta diberikan kuesioner serta diwawancarai oleh peneliti. Dari hasil kuesioner serta wawancara yang telah dilakukan, didapatkan hasil yakni 87,5% atau sejumlah 7 dari 8 orang mahasisswa Papua yang ada di Universitas Negeri Jakarta tidak setuju dengan kebijakan pemekaran wilayah Papua yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Dengan data tersebut, dapat dikatakan sebagian besar dari mahasiswa Papua UNJ menolak akan kebijakan pemekaran wilayah Papua. Sikap tersebut diambil deengan berbagai aktivitas serta pergerakan politik yang mahasiswa Papua UNJ lakukan selama sebelum dilakukan pemekaran atau setelahnya.

Dalam penelitan ini ditemukan beragam data dan fakta yang dikemukakan oleh para mahasiswa Papua UNJ. Para mahasiswa Papua UNJ menjelaskan pandangan mereka terhadap pemekaran Papua dari pribadi mereka. Mereka memandang bahwa pemekaran yang dilakukan memaksa keadaan disamping masih sangat banyak kasus pelanggaran HAM yang perlu diselesaikan terlebih dahulu. Selain itu kondisi pendidikan, ekonomi, kesehatan di Papua yang belum memadai menyebabkan kesenjangan yang tidak kunjung teratasi. Kemudian juga pemekaran ini menyebabkan konflik karena perbedaan pemerintah dengan masyarakat Papua. Para mahasiswa Papua melihat bahwa pemekaran ini akan menyingkirkan orang asli Papua dan diambilnya Sumber Daya Alam yang dimiliki mereka. Sehingga saran dari mereka ialah pemerintah hendaknya memperhatikan hal kecil terlebih dahulu seperti mengurangi kesenjangan serta harus fokus mengembangka kualitas SDM asli Papua supaya dapat mengelola daerah dengan baik.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan kepada para mahasiswa Papua. Dalam penelitian ini dihasilkan dua pendapat terhadap pemekaran Papua, yakni menolak atau mendukung. Mayoritas dari mahasiswa Papua UNJ dengan tegas menolak pemekaran Papua dengan sikap yang mereka tunjukkan dan kritik yang mereka sampaikan. Dukungan terhadap pemekaran Papua dipandang karena dengan adanya pemekaran lapangan pekerjaan akan mudah didapatkan bagi para mahasiswa Papua yang telah lulus dan kembali ke Papua. Adapaun penolakan yang disampaikan oleh para mahasiswa Papua tentunya dengan pendapat dan alasan yang jelas. Mereka menolak karena dengan adanya pemekaran maka akan banyak pendatang masuk ke Papua (transmigrasi). Mereka melihat transmigrasi yang dulu dengan sekarang itu berbeda, jika dulu datang tanpa rasa ingin menguasai namun sekarang para pendatang haus akan kekuasaan.

Menurut seorang akademisi sekaligus pengamat politik nasional menyatakan bahwa, pemekaran wilayah di Papua banyak muatannya, dan pemerintah memiliki tujuan khusus dalam pemekaran di wilayah Papua ini. Pertama, untuk mempermudah pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Kedua, untuk meredam konflik di Papua, dengan adanya pemekaran wilayah di Papua maka akan memunculkan elite politik baru yang akan menjadi lemahnya perlawanan Papua yang ingin merdeka secara politik. Ketiga, ketika Papua sudah dimekarkan maka para elite politik ini harus membagi kepada beberapa provinsi yang baru, namun kenyataannya mereka akan mengambil dana otonomi khusus tersebut.

Kesimpulan

Penelitian mengenai sikap politik mahasiswa Papua di UNJ terhadap pemekaran Papua telah selesai dilaksanakan dengan mewawancara serta mengambil data dari perwakilan mahasiswa Papua sejumlah 10 orang. Pada penelitian ini memiliki hasil bahwa 87,5% atau sejumlah 7 dari 8 orang mahasisswa Papua yang ada di Universitas Negeri Jakarta tidak setuju dengan kebijakan pemekaran wilayah Papua yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Penolakan yang dilakukan oleh mahasiswa UNJ berkaitan dengan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang mana menurut kelompok kontra, pemekaran akan menjadikan kesenjangan masyarakat di Papua meningkat dan sumber daya alam berpotensi di ekspolitasi

secara berlebih. Sedangkan, 1 orang pro berpendapat bahwa pemekaran akan berdampak kepada banyaknya lapangan pekerja untuk mahasiswa yang telah lulus kuliah.

Referensi

Indrawan, M., Caldecott, J., & Ermayanti, E. (2017). Mitigating Tensions over Land Conversion in Papua, Indonesia. *Asia & the Pacific Policy Studies*, *4*(1), 147–157. https://doi.org/10.1002/app5.157

Kambu, Z., Jinca, M. Y., Pallu, M. S., & Ramli, M. I. (2022). Perspectives of the Local Communities on the Development of Trans-Papua Road Infrastructure. *Civil Engineering Journal*, *8*(5), 999–1010. https://doi.org/10.28991/cej-2022-08-05-011

Kusumaryati, V. (2019). Adat Institutionalisation, the State and the Quest for Self-Determination in West Papua. *The Asia Pacific Journal of Anthropology*, *21*(1), 1–16. https://doi.org/10.1080/14442213.2019.1670238

Niessen, C. (2022). Measuring evolving regional autonomy demands and statutes: introducing the Sub-state Autonomy Scale (SAS). *Regional Studies*, *56*(9), 1589–1603. https://doi.org/10.1080/00343404.2022.2056157

Pugu, M. R. (2022). Pro dan Kontra Isu Pemekaran Papua suatu Kajian Hubungan Internasional. *Journal of Syntax Literate*, *7*(4).

Putra, I. E., Putera, V. S., Rumkabu, E., Jayanti, R., Fathoni, A. R., & Caroline, D. J. (2024). "I am Indonesian, am I?": Papuans' psychological and identity dynamics about Indonesia. *International Journal of Intercultural Relations*, *99*, 101935–101935. https://doi.org/10.1016/j.ijintrel.2024.101935

Sloan, S., Campbell, M. J., Alamgir, M., Engert, J., Ishida, F. Y., Senn, N., Huther, J., & Laurance, W. F. (2019). Hidden challenges for conservation and development along the Trans-Papuan economic corridor. *Environmental Science & Policy*, *92*, 98–106. https://doi.org/10.1016/j.envsci.2018.11.011

Sopaheluwakan, W. R. I., Fatem, S. M., Kutanegara, P. M., & Maryudi, A. (2023). Two-decade decentralization and recognition of customary forest rights: Cases from special autonomy policy in West Papua, Indonesia. *Forest Policy and Economics*, *151*, 102951–102951. https://doi.org/10.1016/j.forpol.2023.102951

Wangge, H. R., & Lawson, S. (2021). The West Papua issue in Pacific regional politics: explaining Indonesia's foreign policy failure. *The Pacific Review*, *36*(1), 1–29. https://doi.org/10.1080/09512748.2021.1931417

Yamin, A., Wijayati, M., Makatita, A. S., & Sileuw, N. M. (2023). Together In Lesema: Living Islamic Law among Customary Dani Muslims Polygamy Practice in Papua. *Al - Ihkam Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, *18*(2), 467–495. https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v18i2.9957

Yapsenang, D., Davinsa, D. A., Respati, B., Kurniawan, A., Maryani, M., & Mustagfirin. (2022). Ecological Index, Status and Challenges of the Bird Conservation Programs (Avifauna) Among Indigenous Peoples of the Moi Lemas Tribe, West Papua. *Indonesian Journal of Social Responsibility Review (IJSRR)*, *1*(2), 77–89. https://doi.org/10.55381/ijsrr.v1i2.36